

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEGIATAN
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DI KELURAHAN BETUNG KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

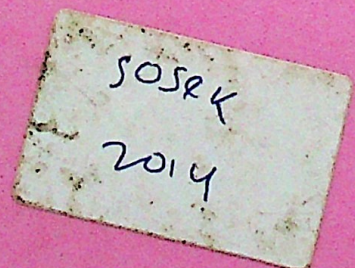
Dalam Mencapai Derajat S-1 Sarjana Sosial



Diajukan Oleh:

ANI SULISTYO RINI

07071002007



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2014**

S
305-420 7
Ani
P
2014

28113 / 28695

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEGIATAN
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DI KELURAHAN BETUNG KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Mencapai Derajat S-1 Sarjana Sosial



Diajukan Oleh:

ANI SULISTYO RINI

07071002007

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2014**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEGIATAN
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DI KELURAHAN BETUNG KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Sosial**

Diajukan Oleh :

ANI SULISTYO RINI

07071002007

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 April 2014

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Tri Agus Susanto, MS

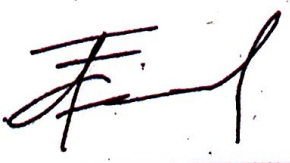
NIP. 195808251982031003

Dosen Pembimbing II

Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si

NIP. 198411052008121003



HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEGIATAN
SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN PADA PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN DI KELURAHAN BETUNG KECAMATAN
BETUNG KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan
Dinyatakan Lulus Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dari Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Sosial
Pada Tanggal 7 Mei 2014

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. H. Tri Agus Susanto, MS
Ketua

Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si
Anggota

Dr. Zulfikri Suleman, MA
Anggota

Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
Anggota

Indralaya, Mei 2014
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- 1. Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah: 11).**
- 2. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. (Hadist Rasulullah SAW).**

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Bapak dan Ibuku**
- 2. Seluruh Keluargaku**
- 3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**
- 4. Teman-teman dan Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengarusutamaan Gender Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Unit analisis yaitu organisasi dan individu. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terwujudnya kesetaraan gender, yaitu adanya manfaat bagi kaum perempuan untuk menjalankan peran reproduktif, peran produktif, dan peran pengelola komunitas. Adapun manfaat lain yang dirasakan kaum perempuan, yaitu terpenuhinya kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender, terutama dalam bidang ekonomi melalui kegiatan pembangunan sarana fisik dan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

ABSTRACT

The study titled “Gender Mainstreaming Savings and Loan Activity In Females at National Program for Community Empowerment in Rural Areas in the Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”. Problems are taken in this study is how the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas. The purpose of this research is to gain an overview and understanding of the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas. This research is a descriptive qualitative research. Unit of analysis is the organization and the individual. Determination is purposive informant. Process of data analysis is done in three stages, namely the stage of data reduction, data display and drawing conclusions and suggestions. The results showed that there has been the realization of gender equality, which is a benefit for women to carry out the role of reproductive, productive role, and the role of community manager. As for the other perceived benefits women, namely the requirement for gender practical and strategic gender needs, especially in the economic sector through infrastructure development and women’s savings and credit activities.

Keywords : Gender Mainstreaming, Special Events Women’s Saving and Loans, National Program for Community Empowerment in Rural Areas.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengarusutamaan Gender Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan di segala bidang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki baik pengetahuan maupun pengalaman. Alhamdulillah, karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya.

3. Bapak Rudy Kurniawan, STh.i, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah meminjamkan buku kepada penulis.
4. Bapak Drs. H. Tri Agus Susanto, MS, selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini, terima kasih atas kesabaran dan kemurahan hati saat membimbing saya. Semoga semua nasihat yang diberikan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
5. Bapak Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini, terima kasih atas kesabaran dan kemurahan hati saat membimbing saya. Semoga semua nasihat yang diberikan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA, dan Ibu Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si, selaku dosen pembahas dalam seminar proposal, terima kasih atas saran-saran yang telah diberikan kepada penulis.
7. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif, terima kasih atas kemurahan hati dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis

mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

9. Kedua orang tuaku, “Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku sewaktu kecil”. Dan seluruh keluargaku.
10. Bude Nasihati, Ibu Endang, Ibu Sri Hartini, keluarga di Kebun Bunga dan di Purwodadi, keluarga Ibu Sulistyawati di Kelurahan Betung, para guru di Taman Kanak-Kanak Baitul Muwafaqoh, terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk penulis.
11. Seluruh guru dan staf sekolah Madrasah, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Seluruh dosen dan teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2006 paket 15 Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat, nasihat, do’a, persahabatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Seluruh karyawan dan staf di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kelurahan Betung yang telah membantu dalam memberikan jawaban, pandangan dan pendapat yang dibutuhkan oleh penulis.
13. Seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memberikan jawaban dan pendapat yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat, terima kasih atas keramahtamahan, dukungan, nasihat, do’a dan konsumsi yang telah diberikan kepada penulis.

14. Terima kasih untuk Ibu Nafis, Ibu Nur, Pak Harun, Ibu Delfiazi Puji Lestari, Ibu Isabella, Ibu Novianti, Bapak Yuzuar Edison, Ibu Lisa Dianti, Ibu Ellyza Octaleny, Retno Anggraini.
15. Kakak tingkat terbaik: Natasya, Dwi Kartika, Lidya, Desli Natalia, Ari Kurniawan, Akhyar Reza Fahlevi, M. Doni Mundarta, Agung, Anri, Rinto Afriansen, Defri Irawan, Deska Rewin, Mella Fitriana, Khumairah, Gita, Rolasta Mendrofa Silaban, Sosiawan Cahya Negara, Asro Guswar Hakim dan Anjang Ari Safara.
16. Teman-teman terbaik: Ridhia Okky Ramadonna, Tuti Ramadanti, Sefta Arianti, Nia Okviati, Erna Yuniarti, Innana Sari, Ning Mala Sari, Dian Puspita, Melta Herawati, Kordia Delima Yanti, Aghita Shella Diny .Z., Heni Agustina Putri Baitillah, Ratiwi Noviana, Wahyuni, Silviana, Rika Dwi Yana, Dwi Endang Maya Lestari, Nia Khoirunisa, Lusiana Agustin, Sutri Miati, Della Purwanti, Nursiah, Maretha Winda Sari, Retti Utami, Indah Permata Sari, Zulfatmah Husni, Hadimas Bagus Suprasetya, Sucipto Adi Tama, Efran Juandi, Aries Marta Satria, Ahmad Didi Syofuwan, Rizky Ramadiana, Andri Antomi, Karwin, M. Rizky Afriza, Sandi Andrean, Hamyadi, Rahman Agus Suandi, Hendra Hermanto, Hendro, Andika Turba, Ibrahim Marta Wijaya, Mediansyah, Jefri Syahril, Mukhlis, Ribut Sukemi dan Robby terima kasih telah menemani penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya.

17. Serta para sahabat saat menjalani Kuliah Kerja Nyata bersama Universitas Sriwijaya dan Universitas Jambi tahun 2010 di Posko Sebapo Muaro Jambi.

Akhirnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Indralaya, Mei 2014

Penulis
Ani Sulistyo Rini
07071002007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Praktis	13
1.4.2 Manfaat Teoritis	13
1.5 Landasan Teori	14
1.5.1 Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender	14
1.5.2 Peran Gender	20
1.5.3 Analisis Gender	26
1.5.4 Faktor-faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender	29
1.5.5 Bentuk Ketidakadilan Gender	32
1.5.6 Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender	35
1.5.7 Ukuran Kesetaraan Gender	37
1.5.8 Kendala Perempuan Untuk Setara dengan Laki-laki	40
1.5.9 Pengarusutamaan Gender dan Model Analisis Gender	45
1.5.10 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	53
1.5.11 Tinjauan Pustaka	67
1.6 Kerangka Pemikiran	69
1.7 Metode Penelitian	82

1.7.1	Sifat dan Jenis Penelitian	82
1.7.2	Lokasi Penelitian	84
1.7.3	Definisi Konsep	85
1.7.4	Strategi Penelitian	86
1.7.5	Unit Analisis	87
1.7.6	Penentuan Informan dan Key Informan	87
1.7.7	Data dan Sumber Data	90
1.7.8	Teknik Pengumpulan Data	92
1.7.9	Teknik Analisa Data	96
1.7.10	Teknik Triangulasi dengan Sumber Data	99
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	101
2.1	Deskripsi Wilayah	101
2.1.1	Sejarah Kelurahan Betung	101
2.1.2	Luas Wilayah, Batas, dan Letak Geografis	102
2.1.3	Keadaan Kependudukan	103
2.1.4	Agama	106
2.1.5	Tingkat Pendidikan	107
2.1.6	Mata Pencanharian	108
2.1.7	Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan Betung	109
2.1.8	Sarana dan Prasarana Pendidikan	109
2.1.9	Sarana dan Prasarana Fisik	110
2.1.10	Struktur Organisasi Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kelurahan Betung	111
2.2	Gambaran Umum Informan Penelitian	111
BAB III	ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	121
3.1	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin	121
3.2	Bentuk Pengarusutamaan Gender dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin	147
3.3	Pengarusutamaan Gender pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Tinjauan Pemenuhan Kebutuhan Praktis Gender dan Kebutuhan Strategis Gender	182

BAB IV PENUTUP 191
4.1 Kesimpulan 191
4.2 Saran 194

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keterlibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 dalam Perencanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012	9
Tabel 2. Informan Penelitian	88
Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan Betung	102
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Betung	103
Tabel 5. Jumlah Penduduk Kelurahan Betung Menurut Usia	105
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelurahan Betung Menurut Agama	106
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	107
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	108
Tabel 9. Jenis Sarana dan Prasarana Pendidikan	109
Tabel 10. Jenis Sarana dan Prasarana Fisik	110
Tabel 11. Daftar Informan Utama	112
Tabel 12. Daftar Informan Pendukung	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	81
Gambar 2. Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan Betung	109
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kelurahan Betung	111

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
FK-PM	: Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat
FK-T	: Fasilitator Kecamatan Teknik
GBHN	: Garis-garis Besar Haluan Negara
Inpres	: Instruksi Presiden
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
MAD	: Musyawarah Antar Desa
MDSos	: Musyawarah Desa Sosialisasi
MKP	: Musyawarah Khusus Perempuan
MMDD/Kel.	: Menggagas Masa Depan Desa/Kelurahan
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PNPM MP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
PjOK	: Penanggungjawab Operasional Kegiatan
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PTO	: Petunjuk Teknis Operasional
RAD-PPDT	: Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPJMKel	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
SDI	: Sumber Daya Insani
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMEA	: Sekolah Menengah Ekonomi Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
STM	: Sekolah Teknik Menengah
SPP	: Simpan Pinjam khusus Perempuan
PU	: Penulis Usulan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
UPK	: Unit Pengelola Kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat, hingga bernegara di seluruh dunia, setiap orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sebagai anggota masyarakat, sejak masa kanak-kanak telah disadarkan dan disosialisasikan oleh anggota keluarga terdekat mengenai adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau gender yang cenderung diciptakan oleh masyarakat daripada ditetapkan oleh Tuhan atau kodrat.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dengan jelas, telah digunakan masyarakat untuk membedakan, memilih atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman dan anggapan yang berkembang turun menurun di masyarakat, bahwa laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sedangkan perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sifat-sifat tersebut dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Laki-laki yang dikodratkan memiliki alat kelamin yang bersifat memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, dan dengan alat reproduksinya tersebut perempuan dapat mengalami hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Fungsi kodrati tersebut tidak dapat dipertukarkan dengan laki-laki. Namun ternyata, perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun temurun

menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki. Hal itu semata-mata perempuan dipandang dari segi jenis kelamin (seks), bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan.

Pada sebagian besar masyarakat, termasuk di Indonesia menganut budaya patriarki yang memperlihatkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya, yang menjadikan perempuan memiliki akses yang kurang dibanding laki-laki dalam hal pengambilan keputusan atau kontrol terhadap sumber daya yang terbatas dalam keluarga maupun bermasyarakat.

Terdapat pula penetapan dalam tafsir keagamaan tertentu dalam hal pembagian hak waris yang menetapkan bahwa laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dibanding untuk perempuan dan laki-laki yang memberikan mahar kepada perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, telah sejak lama banyak pandangan dan pemberian nilai dari masyarakat bahwa perempuan sebagai teman di belakang atau di dapur, yang berfungsi untuk memasak, mencuci, berhias, dan melahirkan anak. Meskipun melahirkan harus dipertahankan. Laki-laki tidak diharuskan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut. Sehingga, perempuan mengalami peran gender yang bersifat menambah. Perempuan dinilai lebih pantas dan cocok untuk berada di dalam wilayah rumah tangga guna menekuni peran reproduktifnya, sedangkan laki-laki dinilai lebih cocok berada di wilayah publik sebagai pencari nafkah utama karena memang sebagian besar laki-laki mempunyai bentuk tubuh yang besar dibanding perempuan.

Perempuan bersama dengan laki-laki juga melaksanakan peran produktif untuk mencari penghasilan berupa materi atau uang, barang, maupun jasa. Dan juga, laki-laki dan perempuan berperan dalam kegiatan pengelola komunitas di masyarakat. Kegiatan ini seringkali tidak menghasilkan materi atau uang, tetapi dapat menyerap banyak waktu dan penting bagi pemeliharaan dan pengembangan aspek spiritual dan budaya komunitas. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan melaksanakan tiga peran atau kerja sekaligus.

Perbedaan gender telah menentukan akses seseorang terhadap sumber daya yang terbatas. Masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam perekonomian cenderung lebih memilih memberikan pendidikan formal kepada anak laki-laki mereka. Disebabkan masih adanya anggapan mengenai tanggungjawab utama perempuan adalah dalam mengurus rumah tangga serta memelihara dan menjaga kesehatan anggota keluarga lainnya. Sehingga, akses dan peluang perempuan terbatas dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki guna mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, maupun pengalaman yang sangat bermanfaat agar seseorang mampu menjadikan dirinya sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Bahkan, tahun-tahun sejak Perang Dunia Kedua, ketika daerah jajahan meraih kemerdekaan dan bergabung dengan sistem perekonomian dunia yakni perekonomian terencana maupun kredit, pembangunan dilihat sebagai industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang disebut modernisasi. Industrialisasi dijalankan sebagai jalan mengatasi kemiskinan melalui bantuan pembangunan dari negara-negara maju serta kaya dalam bentuk penyaluran modal dan bantuan

ekonomi. Diasumsikan bahwa melalui proses modernisasi, keuntungan yang dihasilkan negara-negara berkembang secara bertahap akan menetes ke bawah, melalui kepala keluarga yang dikenal ialah laki-laki.

Di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan di wilayah pertanian dan wilayah perkotaan. Di wilayah pertanian dijalankan program Revolusi Hijau sekitar awal tahun 1970-an dengan pola umumnya adalah membantu keluarga petani melalui kepala rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai laki-laki, sekali pun secara fisik ia tidak ada di rumah. Perempuan tidak pernah menjadi sasaran utama Program Revolusi Hijau. Akses terhadap informasi, kredit, dan teknologi, serta pengambilan keputusan hanya diperuntukkan kepada kepala keluarga laki-laki, tidak untuk perempuan. Penurunan partisipasi tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan, terutama tenaga kerja perempuan di bidang pertanian disebabkan petani kaya dan tuan tanah yang lebih memilih memanfaatkan bibit varietas unggul menggunakan sistem tebasan untuk mengganti tenaga buruh perempuan yang biasa memetik padi dengan *ani-ani*, karena dinilai lebih cepat dan murah.

Dengan demikian, jika sebelumnya dalam pertanian peran perempuan meliputi otoritas dan pengambilan keputusan karena keterlibatannya yang menyeluruh dalam pekerjaan pertanian, tetapi program Revolusi Hijau mengakibatkan kaum perempuan secara perlahan-lahan tersingkir dari sistem pertanian yang mengganti peran perempuan dengan teknologi yang dikontrol oleh kaum laki-laki. Sistem kapitalis juga berlaku dalam hubungan antara petani tak bertanah dan perempuan, yaitu, petani tak bertanah membeli perempuan untuk melayani keluarganya. Hal ini mengakibatkan laki-laki yang dilambangkan lebih

kuat daripada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar serta kontrol yang kuat dalam pengambilan keputusan pada rumahtangga.

Masyarakat yang tersisih dari sektor pertanian kemudian memasuki sektor informal seperti menjadi pedagang kecil, menjadi pemulung, menjadi pembantu rumahtangga di wilayah perkotaan maupun di luar negeri atau juga berebut lapangan pekerjaan sektor formal industri manufaktur. Namun, pekerjaan tersebut tidak dilindungi oleh undang-undang, berada dalam kondisi kerja yang tidak memadai, seperti upah rendah, jam kerja panjang, sulitnya jaminan kesehatan, dan tidak ada jaminan kelangsungan kerja jangka panjang. Adanya pandangan bahwa kualitas sumber daya perempuan kurang berkualitas dibandingkan laki-laki, sehingga meletakkan perempuan sebagai salah satu alat promosi dan alat produksi yang dapat dimanfaatkan dan dapat dibayar murah.

Investasi meningkat diikuti dengan peningkatan keterlibatan perempuan di sektor publik upahan, tetapi status pekerja perempuan tidak mengalami perubahan dan beban ganda di rumah. Upaya memasukkan faktor manusia tetap melihat manusia sebagai penerima pasif pembangunan, yang dirancang oleh pihak luar, sebagai konsumen pembangunan dan bukan produsen. Akibatnya upaya ini gagal memaknai bahwa manusia sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki, dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.

Berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi keluarga, terutama perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga telah diupayakan. Program pengembangan praktis bernilai

stereotip berupa kegiatan-kegiatan keterampilan, seperti latihan memasak, menjahit, menyulam, dan merawat kecantikan, bukan berdimensi pemberdayaan. Umumnya pemikiran-pemikiran dari pelaksana proyek masih keliru dalam penilaian stereotip perempuan, di mana perempuan hanyalah pencari nafkah nomor dua, karena suamilah yang dianggap pencari nafkah utama. Hasil yang didapat diasumsikan hanyalah untuk sekedar menambah pendapatan keluarga.

Di Indonesia, kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi perhatian pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan munculnya berbagai kegiatan yang berbasis gender. Pengarusutamaan gender adalah penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi perempuan. Dengan demikian, diperlukan pembinaan peran perempuan agar mampu meningkatkan peran dan potensi mereka, terutama produktivitasnya melalui pemberdayaan mereka di segala bidang.

Kesetaraan gender adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dengan memperoleh kesamaan peluang dan kesempatan itu setiap orang dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kesetaraan gender adalah isu pembangunan yang paling mendasar dari tujuan pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup upaya pemenuhan kebutuhan gender perempuan yang meliputi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan peran reproduktif, sedangkan kebutuhan strategis gender berupa pemberdayaan kepada perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Saat ini pembangunan lebih difokuskan pada kemiskinan selain gender. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang diluncurkan langsung oleh presiden pada tahun 2007 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi berbeda dengan program-program sebelumnya karena dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perempuan diharapkan berpartisipasi dalam proses kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai pengusul, pengambil keputusan, pelaksana kegiatan, pemelihara, dan sekaligus penerima manfaat.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip kesetaraan dan keadilan gender, oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program penting bagi masyarakat untuk secara aktif menghapuskan hal-hal yang menghambat kesetaraan gender dan karenanya juga akan meningkatkan keberhasilan pengentasan kemiskinan dan ini baik untuk diterapkan dalam

program pemberdayaan perempuan. Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diharapkan dapat menanggapi kebutuhan praktis perempuan. Perempuan bisa mengakses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dimana program-programnya ada di tingkat kecamatan sampai ke desa-desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dilaksanakan hampir di seluruh kecamatan di wilayah Indonesia. Salah satu wilayah di Sumatera Selatan yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini adalah Kabupaten Banyuasin tepatnya di Kecamatan Betung yaitu melalui program khusus di daerah perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Betung dilaksanakan melalui kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dan pembangunan sarana fisik untuk masyarakat di desa-desa dan di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dilakukan guna membantu masyarakat perempuan untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan pinjaman modal usaha.

Ketentuan dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, ialah harus melibatkan dua orang masyarakat yang akan berperan sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) satu orang perempuan dimaksudkan untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat, terutama kaum perempuan dalam mengikuti atau melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan melalui kegiatan yang dapat dilakukan di desa atau kelurahan, yaitu kegiatan simpan pinjam khusus perempuan dan pembangunan sarana fisik.

Namun dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Betung ternyata masih dijumpai adanya kesenjangan, yaitu masih kurangnya keterlibatan kaum perempuan. Dalam perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Betung untuk pelaksanaan tahun 2012 yang dilaksanakan pada tahun 2011, keterlibatan kaum perempuan masih kurang. Selanjutnya keterlibatan perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Betung dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.
Keterlibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Tahun 2011
dalam Perencanaan Pelaksanaan PNPM-MP Tahun 2012

No.	Kelurahan/Desa di Kecamatan Betung	KPMD yang ada (Menurut Jenis Kelamin)		Keterlibatan KPMD pada Pertemuan MD Sosialisasi Tahun 2011	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Kelurahan Betung	1	1	x	x
2.	Kelurahan Rimba Asam	1	1	√	x
3.	Desa Suka Mulya	1	1	√	√
4.	Desa Bukit	2	-	√	-
5.	Desa Sri Kembang	1	1	√	√
6.	Desa Lubuk Karet	1	1	√	x
7.	Desa Pulau Rajak	1	1	√	√
8.	Desa Taja Raya I	1	-	√	-
9.	Desa Taja Raya II	1	1	x	x
10.	Desa Taja Mulya	1	1	x	√
11.	Desa Taja Indah	1	1	√	x
.	Jumlah (Orang) :	12	9	8	4

Sumber: Dokumen Daftar Hadir Pertemuan Musyawarah Desa Sosialisasi Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan PNPM MP Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011.

Tabel 1 dapat menunjukkan bahwa dari sembilan orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perempuan yang ada, hanya ada empat orang saja yang terlibat langsung dalam kegiatan pertemuan Musyawarah Desa Sosialisasi (MDSos) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) laki-laki dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perempuan di Kelurahan Betung tidak menghadiri Musyawarah Desa Sosialisasi (MDSos). Padahal Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perempuan ialah salah satu pendamping utama masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa atau di kelurahan.

Pelaksanaan Musyawarah Desa Sosialisasi (MDSos) dimaksudkan untuk melakukan perencanaan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di desa-desa di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, baik berupa pemilihan dan penetapan masyarakat sebagai pengurusnya untuk membantu melaksanakan kegiatan dari program, yaitu kegiatan pembangunan sarana fisik dan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Pengarusutamaan Gender Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuasin, mengingat bahwa Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) telah

menetapkan 199 kabupaten tertinggal yang perlu mendapat prioritas pembangunan. Kabupaten tertinggal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan terdapat enam (6) kabupaten, salah satunya ialah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Betung termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Betung karena paling banyak terdapat perempuan yang berada pada usia produktif. Kelurahan Betung merupakan hasil dari pemekaran Kelurahan Rimba Asam pada tahun 2007. Kelurahan Betung mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak yang ada di Kecamatan Betung, yakni penduduk laki-laki berjumlah 9.006 jiwa dan perempuan berjumlah 8.328 jiwa, dengan potensi jumlah penduduk perempuan usia produktif sebanyak 5.053 jiwa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana bentuk Pengarusutamaan Gender dilihat dari aspek akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?

3. Bagaimana pengarusutamaan gender pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam tinjauan pemenuhan kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai bentuk pengarusutamaan gender dilihat dari aspek akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin?
3. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam tinjauan pemenuhan kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat umum ataupun pihak-pihak yang terkait dalam mendukung penerapan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan partisipatif masyarakat termasuk kaum perempuan. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai bentuk pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, terutama yang dilihat dari aspek akses, manfaat, partisipasi dan kontrol. Serta memahami pengarusutamaan gender pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam tinjauan pemenuhan kebutuhan gender praktis

dan kebutuhan gender strategis perempuan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender

Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respons yang tidak proporsional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender.

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*gender*'. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan) (Nugroho, 2011: 1).

Fakih (2001:7-8) mengungkapkan jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada

manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Secara struktur biologis atau jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki alat dan fungsi biologis yang melekat serta tidak dapat dipertukarkan. Laki-laki tidak dapat menstruasi, tidak dapat hamil, karena tidak memiliki organ peranakan. Sedangkan perempuan tidak bersuara berat, tidak berkumis, karena keduanya memiliki hormon yang berbeda (Handayani dan Sugiharti, 2001:3-4).

Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Oakley dalam Nugroho (2008:32), mengatakan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Ia mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.

Secara umum gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki atau perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Menurut Oakley dalam Fakih (2001:71), gender berarti:

“Perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavior differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang”

Lebih lanjut Caplan dalam Fakih (2001:72), mengemukakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (sex), meskipun bisa berubah (fisiknya) tetapi fungsi reproduksinya tetap tidak berubah.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (2001:85), mengartikan gender adalah perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah dan diubah sesuai perubahan zaman.

Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis (seks) adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Jadi, perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki bukanlah sekedar biologis, namun proses kultural dan sosial. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke

kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak berubah (Nugroho, 2008:32).

Gailey dalam Ridjal, Margiyani, Husein (1993:30), mengemukakan bahwa gender tidak bersifat universal. Ia bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: 1) gender tidak identik dengan jenis kelamin, 2) gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Windy dalam Nurhaeni (2009:21), menyebutkan istilah gender berasal dari bahasa latin *genus* yang berarti *species* (jenis), macam yang keduanya biasa digunakan dalam tata bahasa. Dalam bahasa Latin, Jerman dan Rusia terdapat tiga jenis kata yang bersifat feminin, maskulin dan netral. Sementara itu di kawasan pengguna bahasa Romawi Modern seperti Prancis, Italia dan Spanyol hanya terdapat dua jenis kata, yaitu feminin yang menunjuk pada perempuan dan maskulin yang menunjuk pada laki-laki

Istilah, gender dengan pemaknaan seperti yang dipergunakan pada saat ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis (Nugroho, 2008:31).

Windy dalam Nurhaeni (2009:22) mengemukakan bahwa jenis kelaminlah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasar unsur biologis yang dimiliki, sedangkan gender dimaksudkan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosio kultural (mengacu pada unsur emosional dan kejiwaan).

Menurut Mosse dalam Nurhaeni (2009:22), jenis kelamin biologis merupakan pemberian (begitu saja): dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan, tetapi cara untuk menjadi maskulin atau feminin adalah gabungan dari faktor mendasar yaitu biologis serta interpretasi biologis oleh kebudayaan.

Subhan dalam Nurhaeni (2009:22-23), menyebutkan bahwa jender (Inggris: gender) mempunyai arti perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Sementara itu, *Women's Studies Encyclopedia* dalam Nugroho (2008:34), dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Subhan mengatakan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial, budaya dan hukum (hak dan kewajiban) atau dari sudut non-biologis.

Butler dalam Nugroho (2008:33-34), mengemukakan bahwa gender merupakan bentuk simbolik dari aksi masyarakat yang mengikuti kebiasaan yang dilakukan. Butler menyebutkan bahwa:

“Gender adalah sebuah identitas yang dibentuk oleh waktu, dilembagakan dalam suatu eksterior ruang melalui serangkaian kegiatan khas (*stylized repetition of acts*) yang berulang. Efek dari gender diproduksi melalui kegiatan khas tersebut yang akhirnya membentuk ilusi-ilusi yang mengikat sang diri-gender itu sendiri”.

Sedangkan Lips dalam Nugroho (2008:34), mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Lindsey dalam

Nugroho (2008:34), menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.

Wilson dalam Nugroho (2008:35), mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Suzanne Williams, Janet Seed, dan Adelina Mwau dalam Nugroho (2008:32-33), mengartikan gender sebagai berikut:

“Manusia dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan laki-laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka dididik tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan, dan melakukan pekerjaan yang sepantasnya sebagai perempuan dan laki-laki dewasa. Mereka dididik bagaimana berelasi di antara mereka, sikap-sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas diri dan peranan gender mereka dalam masyarakat.”

Rogers dalam Ridjal, Margiyani, Husein (1993:30), mengemukakan bahwa pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat. Gender membagi atribut dan pekerjaan

menjadi “maskulin” dan “feminin”. Gender yang berlaku dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dan antara perempuan dan keperempuanan. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminin. Akan tetapi hubungan itu bukan merupakan korelasi absolut.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

1.5.2 Peran Gender

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka ia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2006:213), mengemukakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Levy dalam Soekanto (2006:215-216), mengemukakan aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpolakan dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh

seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (*image*) yang ingin dikembangkan oleh seseorang.

Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan. Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan atau laki-laki yang sudah mencakup aspek penilaian.

Sebagai contoh; kesepakatan umum untuk peran seorang ibu ialah merawat anak dan seorang ayah adalah menghidupi keluarga. Dua peran ini berhubungan dengan serangkaian tingkah laku, konsekuensi dan nilai-nilai sosial. Jika dipandang tidak sesuai, misalnya ibu tidak merawat anak-anaknya atau ayah tidak menafkahi keluarganya maka masyarakat akan memberikan sanksi sosial (penilaian) tertentu, seperti ibu dan ayah yang tidak bertanggungjawab (Hubeis, 2010:80-81).

Peran gender berbeda antar-masyarakat atau bahkan antar kelompok di dalam masyarakat tertentu dan acap mengalami ubahan setiap saat. Peran gender menampilkan kesepakatan pandangan dalam masyarakat dan budaya tertentu perihal ketepatan dan kelaziman bertindak untuk seks tertentu (jenis kelamin tertentu) dan masyarakat tertentu. Namun, secara perseorangan ada kemungkinan bahwa seorang perempuan dengan peran gender per jenis seks yang dipandang tepat dan lazim serta disepakati di masyarakat bersangkutan (Hubeis, 2010:81).

Peran gender adalah peran ekonomi dan sosial yang dipandang layak oleh masyarakat untuk diberikan kepada laki-laki atau perempuan. Laki-laki sering diberi peran produksi atau pencari nafkah, yang cenderung bersifat sekuensial, sementara perempuan mempunyai peran ganda, yaitu tanggungjawab terhadap pekerjaan rumah tangga, pencari nafkah tambahan dan kegiatan di masyarakat yang sering harus dilakukan secara simultan. Peran dan tanggungjawab gender dapat berbeda pada budaya atau waktu yang berbeda (Makarao, 2009:17-18).

Peran gender teridentifikasi oleh kegiatan atau pekerjaan yang dipandang tepat untuk tiap orang menurut perbedaan jenis kelamin. Peran gender yang dipandang tepat untuk perempuan dan laki-laki berbeda antar masyarakat. Sebagai contoh, kegiatan berdagang dalam skala kecil dipandang tepat untuk diperankan oleh laki-laki pada komunitas tertentu, tetapi di beberapa tempat yang lain justru dikonsider tepat untuk diperankan oleh perempuan. Hal ini terkait dengan persepsi tentang pembagian pekerjaan, sebagai berikut:

1. Pembagian pekerjaan menurut seks mengacu pada cara di mana semua jenis pekerjaan (reproduktif, produktif, dan pekerjaan sosial) dibagi antara perempuan dan laki-laki dan bagaimana pekerjaan tersebut dinilai dan dihargai dalam suatu masyarakat atau kultur tertentu.
2. Di kebanyakan masyarakat, pekerjaan laki-laki lebih mengarah pada pekerjaan yang bersifat produktif, dibayar lebih baik, lebih bergengsi, lebih teratur dan juga diperhitungkan dalam statistik nasional.

3. Pekerjaan perempuan lebih banyak pada pekerjaan domestik (rumahtangga) dan reproduktif, tidak dibayar, musiman, paruh-waktu dan tidak dikenal atau tidak diakui (*unrecognized*). Sifat pekerjaan rutin dan cenderung monoton.
4. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengamati pembagian kerja gender tidak semata-mata hanya mengamati kegiatan tetapi mengamati kaitan kegiatan tersebut dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pembagian kerja yang dikembangkan di kebanyakan masyarakat telah membedakan tugas perempuan dengan tugas laki-laki: seorang laki-laki ditetapkan bertanggungjawab untuk melindungi keluarga, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan produktif, administrasi dan pertahanan dalam masyarakat. Perempuan dibebani dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia termasuk tugas rumahtangga; tanggungjawab di dalam rumahtangga ditetapkan berbeda untuk perempuan dan laki-laki: pekerjaan mengasuh dan melayani keluarga merupakan tanggungjawab perempuan, sedangkan pekerjaan mengatur serta mengawasi keseluruhan anggota keluarga merupakan tanggungjawab laki-laki.

Penetapan tugas untuk laki-laki dan perempuan memiliki standar nilai yang beragam dan berbeda antar-budaya dan antar-masyarakat dan dalam periode waktu yang berbeda. Keragaman ini terjadi karena pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan merupakan produk sosial yang dipengaruhi oleh produk ekonomi, politik, dan struktur masyarakat yang juga mengalami perubahan (Hubeis, 2010:85-86).

Seorang laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga: sebagai kepala keluarga, laki-laki merupakan presentasi keluarga di masyarakat dan sebagai pencari nafkah, laki-laki dianggap sebagai *the bread winner of the family*. Pemposisian peran dan status laki-laki dan perempuan seperti ini telah terjadi turun menurun dari generasi ke generasi dan dimantapkan demi keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Hubeis, 2010:91-92).

Di kebanyakan masyarakat, termasuk di Indonesia, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan menggambarkan peran perempuan. Basis awal dari pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam fungsi reproduksi.

Secara umum, bahwa tugas laki-laki dan perempuan terkait dengan perbedaan peran mereka dalam menjaga keberlanjutan keluarga. Namun demikian, banyak kegiatan tidaklah langsung atau jika tidak keseluruhannya terkait pada perbedaan fisik tapi lebih didesain sebagai kebutuhan dan kepentingan yang dimaksud yaitu kelanggengan dan keharmonisan relasi antara laki-laki-perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Karenanya, kejadian ketimpangan dan ketidakadilan pembagian tugas dianggap semata-mata hanyalah untuk kepentingan meniadakan konflik dan menyamankan serta mensekankan hidup dan kehidupan (Hubeis, 2010:142-143).

1.5.3 Analisis Gender

Analisis gender merupakan kajian terhadap perbedaan dan kesenjangan peran laki-laki dan perempuan, ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan mereka, hambatan dan kesempatan serta dampak perbedaan tersebut terhadap kehidupan mereka. Kenyataannya, banyak ditemukannya praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena ada tiga peran perempuan. Kerja perempuan dalam reproduksi, kerja ekonomi produktif, dan manajemen komunitas disebut tiga serangkai peran perempuan.

1. Peran Reproduksi (Domestik)

Peran ini berhubungan dengan peran perempuan untuk mengurus rumah tangga dan mensejahterakan keluarga, termasuk hamil, melahirkan, merawat anak, mengurus anggota keluarga yang sakit, dan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti: memasak, mencuci dan mengangkat air. Pekerjaan ini tidak menghasilkan uang dan sangat sulit diukur. Namun tidak pernah dianggap suatu pekerjaan. Karena dilihat sebagai tanggungjawab perempuan semata. Padahal pekerjaan ini memakan waktu, menguras tenaga dan harus dikerjakan setiap hari (Makarao, 2009:19-20).

Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan sumber daya insani (SDI) dan tugas kerumahtanggaan seperti menyiapkan makanan, mengumpulkan air, mencari kayu bakar, berbelanja, memelihara kesehatan dan gizi keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Kegiatan reproduktif sangat penting dalam

melestarikan kehidupan keluarga, tetapi jarang dipertimbangkan sebagai bentuk pekerjaan yang konkrit. Dalam masyarakat miskin, sebagian besar pekerjaan reproduktif dilakukan perempuan secara manual (menggunakan tangan).

Kegiatan reproduktif pada umumnya memerlukan waktu yang lama, bersifat rutin, cenderung sama dari hari ke hari, dan hampir selalu merupakan tanggungjawab perempuan dan anak perempuan. Pekerjaan reproduktif yang dilakukan di dalam rumah tangga tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan produktif (karena tidak dibayar-*unpaid word*) (Hubeis, 2010:83).

2. Peran Produktif

Peran ini berhubungan dengan segala aktifitas dan pekerjaan yang menghasilkan uang, seperti: bertani, berdagang, pembantu rumah tangga, bekerja di kantor, dan berbagai pekerjaan lainnya. Namun sebagian besar upah yang diperoleh kaum perempuan jauh lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki untuk pekerjaan yang sama beratnya. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi tawar perempuan dan kesempatan mereka yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji lebih tinggi, artinya perempuan tersebut harus bekerja di luar rumah (Makarao, 2009:19).

Pekerjaan produktif menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan (petani, nelayan, konsultansi, jasa, pengusaha, dan wirausaha). Pembagian kerja dalam peran produktif dapat memperlihatkan dengan jelas perihal perbedaan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, untuk kegiatan di bidang pertanian maka

kegiatan membajak atau bekerja dengan menggunakan bantuan peralatan mesin merupakan tanggungjawab laki-laki, sedangkan pekerjaan menanam, menyiangi, pemerah susu dan pekerjaan lainnya yang dianggap ringan merupakan pekerjaan perempuan. Jenis pekerjaan yang dinilai sebagai pekerjaan produktif terkait pada pekerjaan yang dapat diperhitungkan melalui sistem perhitungan nasional (Hubeis, 2010:83-84).

3. Peran di Masyarakat (Sosial)

Peran ini berkaitan dengan keterlibatan kaum perempuan untuk ikut andil dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial. Umpamanya, menghadiri rapat, kegiatan spiritual, kebudayaan, menghibur kerabat dan sanak keluarga yang tertimpa musibah, aktif di organisasi kemasyarakatan. Peran ini melibatkan laki-laki dan perempuan, namun umumnya pengambilan keputusan selalu berada di tangan laki-laki (Makarao, 2009:20)

Peran masyarakat terkait dengan kegiatan jasa dan partisipasi politik. Kegiatan jasa masyarakat banyak bersifat relawan dan biasanya dilakukan oleh perempuan. Misalnya, membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan (Posyandu, Karang Balita), menyiapkan makanan untuk acara kemasyarakatan, rapat-rapat, dan lain-lain. Laki-laki kurang banyak terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan relawan seperti ini. Peran politik di masyarakat adalah peran yang terkait dengan status atau kekuasaan seseorang pada organisasi tingkat desa atau tingkat yang lebih tinggi. Sebagian besar kegiatan yang terkait dengan politik umumnya dilakukan oleh laki-laki (Hubeis, 2010:84).

Laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai berbagai macam peran di dalam masyarakat. Namun kaum laki-laki biasanya memfokuskan diri hanya pada perannya sebagai pencari nafkah, sementara kaum perempuan harus mengerjakan ketiga peran tersebut sekaligus. Apabila perempuan tidak bisa mengerjakan ketiga peran tersebut, maka akan dituding gagal dalam melaksanakan kewajibannya (Makarao, 2009:20).

1.5.4 Faktor-faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender, dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Beberapa anggapan yang memojokkan kaum perempuan dalam konteks sosial ini menyebabkan sejumlah persoalan.

Pertama, adanya mitos-mitos. Karena sebagian besar masyarakat di wilayah negara Indonesia menganut budaya patriarki, yaitu yang berkuasa dalam keluarga adalah bapak. Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. Selain itu, sistem kapitalis yang berlaku juga menyebabkan ketidakseimbangan gender, yaitu siapa yang mempunyai modal besar itulah yang menang.

Sehingga, sejak dulu banyak mitos-mitos yang muncul di masyarakat akan menguntungkan kaum laki-laki dan mendeskritkan kaum perempuan. Perempuan itu dianggap sebagai *suargo nunut neraka katut*, perempuan itu sebagai *konco wingking* yang berarti teman di belakang atau di dapur yang berfungsi untuk memasak, berhias, dan melahirkan anak, meskipun melahirkan anak masih harus dipertahankan. Disamping itu juga ada anggapan bahwa pantangan bagi laki-laki bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga lainnya, karena dikhawatirkan rezekinya akan terhambat.

Kedua, peran rangkap tiga. Peran perempuan setelah pernikahan adalah melahirkan anak, dimana peran ini dinamakan peran reproduktif. Peran ini memang tidak bisa diganti oleh laki-laki karena memang sifatnya kodrati, dan tidak bisa dihindari. Di samping melahirkan anak, perempuan secara tradisional harus melakukan pekerjaan di rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjaga rumah, mengasuh anak, mempersiapkan keperluan keluarga sehari-hari.

Secara turun temurun pekerjaan ini identik dengan kaum perempuan, sehingga sampai kapanpun urusan rumah adalah urusan perempuan. Hal ini tidak berperspektif gender. Kaum perempuan seringkali melakukan peran produktif, yaitu kegiatan yang menghasilkan produksi barang atau jasa, untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Perempuan dan laki-laki melakukan kegiatan produktif, akan tetapi pada umumnya fungsi dan tanggungjawab masing-masing berbeda sesuai dengan pembagian kerja gender yang berlaku, dimana laki-laki sebagai pencari nafkah utama di wilayah publik, dan perempuan sebagai pencari nafkah sambilan

yang lebih pantas atau cocok berada di wilayah domestik. Kegiatan produktif yang dilakukan perempuan seringkali kurang diakui dibanding yang dilakukan laki-laki.

Sebagai anggota komunitas sosial, perempuan juga melakukan peran sosial yang mencakup kegiatan sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini sering tidak menghasilkan uang, tetapi seringkali menyerap banyak waktu dan penting bagi pemeliharaan dan pengembangan aspek spiritual dan kultural komunitas. Perempuan dan laki-laki sama-sama terlibat dalam kegiatan komunitas sesuai dengan sistem sosial gender yang berlaku, biasanya laki-laki lebih dominan dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, karakteristik psikologis laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial tentang gender secara evolusi akhirnya mempengaruhi perkembangan masing-masing jenis kelamin. Misalnya: sifat gender laki-laki harus kuat dan agresif sehingga konstruksi sosial itu membuat laki-laki terlatih dan termotivasi menuju dan mempertahankan sifat yang ditentukan tersebut yang memang laki-laki lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena konstruksi sosial bahwa kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak kecil, sosialisasi tersebut mempengaruhi perkembangan emosi, visi dan ideologi kaum perempuan, serta perkembangan fisik dan biologis mereka.

Karena proses sosialisasi yang berjalan secara mapan, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender tersebut dikonstruksi atau kodrat biologis ketentuan Tuhan. Apabila anak laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama,

diperlukan dan diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin akan mencapai prestasi yang sama.

Namun, yang berkembang di masyarakat tidaklah demikian, faktor budaya telah mempengaruhi pola pengasuhan orangtua terhadap anaknya. Sistem patriarki yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat bahwa laki-lakilah yang berkuasa sehingga muncullah pemikiran lebih mementingkan atau mendahulukan laki-laki. Kondisi ini dipolakan sejak bayi baru lahir dan dimapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terkesan bahwa yang demikian itu tidak dapat ditolak, akan tetapi harus diterima, dan harus dilakukan (Handayani dan Sugiarti, 2001:10-14).

1.5.5 Bentuk Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender. Perbedaan gender telah mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotipe yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial dan akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural, dalam proses yang panjang akhirnya telah mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan, antara lain:

- a. Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan, termanifestasi dalam, posisi subordinasi kaum perempuan di hadapan laki-laki. Baik dalam tradisi,

tafsir keagamaan, maupun dalam aturan birokrasi dimana kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari kaum laki-laki.

- b. Secara ekonomi, perbedaan dan pembagian gender juga melahirkan proses marginalisasi perempuan. Proses marginalisasi perempuan terjadi dalam kultur, birokrasi maupun program-program pembangunan. Dalam program pertanian yang dikenal dengan Revolusi Hijau, kaum perempuan secara sistematis disingkirkan dan dimiskinkan. Penggantian bibit pertanian jenis unggul terpaksa mengganti *ani-ani* dengan sabit, artinya mengusir banyak sekali pekerjaan kaum perempuan di komunitas agraris terutama di perdesaan. Dengan hanya mengakui laki-laki sebagai kepala rumah tangga, program industrialisasi pertanian secara sistematis menghalangi, tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pelatihan dalam bidang pertanian ataupun akses kredit. Perlakuan semacam itu secara tidak terasa mengusir keberadaan kaum perempuan ke garis marginal. Di sektor lain juga terjadi banyak sekali jenis aktivitas kaum perempuan yang selalu dianggap tidak produktif (dianggap bernilai rendah), sehingga mendapat imbalan ekonomis lebih rendah.
- c. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan atau stereotipe terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe merupakan satu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian label yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat kepada posisi dan kondisi kaum perempuan. Misalnya stereotipe kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga sangat merugikan mereka. Akibatnya jika

mereka hendak aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sebagai bidang kegiatan laki-laki, seperti kegiatan politik, bisnis ataupun di pemerintahan, maka dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Sementara stereotipe laki-laki sebagai pencari nafkah mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak dihitung, tidak dianggap atau tidak dihargai.

- d. Perbedaan dan pembagian gender juga membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dengan memeras keringat jauh lebih panjang (*double-burden*). Pada umumnya, hampir semua pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan. Terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja (umpamanya buruh industri atau profesi lainnya), artinya mereka memiliki peran ganda (beban kerja ganda di rumah dan di luar rumah).
- e. Perbedaan gender tersebut juga melahirkan kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun secara mental. Keberagaman bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi karena perbedaan gender muncul dalam berbagai bentuk. Yaitu yang bersifat fisik seperti pemerkosaan, persetubuhan antaranggota keluarga, pemukulan dan penyiksaan, bahkan yang lebih sadis lagi pemotongan alat genital perempuan dan lain sebagainya. Kekerasan dalam bentuk nonfisik, yang sering terjadi misalnya pelecehan seksual, menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional.

f. Perbedaan dan pembagian gender dengan segenap manifestasinya di atas, mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada. Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga merupakan proses penjinakan peran gender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Jadi, keseluruhan manifestasi tersebut ternyata saling berkait dan saling tergantung serta saling menguatkan satu sama yang lain (Fakih, 2001:147-151).

1.5.6 Pengertian Kesenjangan dan Keadilan Gender

Kesenjangan gender adalah seperti sebuah frasa (istilah) suci yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesenjangan gender dalam tataran praktis, hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka istilah kesenjangan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi, penindasan, kekerasan, dan sebagainya (Megawangi, 1999:19).

Dian Rakyat dalam Nurhaeni (2009:32-33), mengemukakan bahwa kesenjangan gender adalah isu pembangunan yang paling mendasar-tujuan pembangunan itu sendiri. Kesenjangan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesenjangan gender adalah bagian

penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang perempuan maupun laki-laki untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup.

Kesetaraan gender dapat berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Nugroho, 2008:60).

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama dalam hubungan perempuan dan laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Nurhaeni (2009:33). Selanjutnya, Unesco dalam Nurhaeni (2009:33-34), mendefinisikan keadilan gender dan kesetaraan gender sebagai berikut:

“Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep yang menyatakan bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku dan prasangka-prasangka. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggungjawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan”.

“Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini mencakup perlakuan yang setara atau perlakuan yang berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya”.

Kesetaraan gender merupakan keadaan tanpa diskriminasi (sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin) dalam memperoleh kesempatan, pembagian sumber-sumber dan hasil pembangunan, serta akses terhadap pelayanan. Keadilan gender adalah dalam distribusi manfaat dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan, yang didasari atas pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kebutuhan dan kekuasaan. Perbedaan ini perlu dikenali dan diperhatikan untuk dipakai sebagai dasar atas perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi laki-laki dan perempuan (Makarao, 2009:17).

Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka kesetaraan dan keadilan gender merupakan komponen penting yang harus diwujudkan. Dalam kapasitas demikian, maka semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Perempuan dan laki-laki tidak harus diperlakukan secara sama, tetapi diperlakukan sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian perempuan dan laki-laki bisa diperlakukan secara berbeda tetapi perlakuan tersebut dinilai setara (diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan dan kesempatannya).

1.5.7 Ukuran Kesetaraan Gender

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol

atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Nugroho, 2008:60).

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai makna dari kata “akses”. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2004:15), kata akses mengandung arti sebagai 1) terusan, 2) jalan menuju kepada hidayah Allah. Akses sebagai jalan masuk, menunjuk pengertian pada seseorang untuk mencapai atau mendekati sesuatu. Dengan demikian, akses merupakan kemudahan akan ketersediaan jalan masuk dan kesempatan bagi seseorang untuk mencapai tujuan dengan mudah.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:236), kata kontrol mengandung arti sebagai pengawasan, pemeriksaan, pergi kesana-sini. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2004:78), kata “kontrol” mengandung makna pengawasan, penguasaan, pengaturan, pembatasan, pengendalian. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2004:264), kata partisipasi mengandung arti pengambil bagian, pengikut sertaan.

Menurut Craig dan Mayo dalam Hikmat (2010:3), partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan.

Menurut Sadu Wasistiono (2001:71), yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya membuat orang atau kelompok menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri". Ditegaskan inti dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian baik individu, kelompok, maupun masyarakat.

Sumodiningrat dalam Nugroho (2011), mengatakan bahwa untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, antara lain:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menurut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Pemberdayaan perempuan diindikasikan oleh situasi ketika sebagian besar mayoritas dari perempuan akan mampu menikmati "kebebasan memilih" untuk mandiri dan mengembangkan diri sehingga dapat memiliki kesetaraan akses terhadap sumber daya di ranah domestik atau publik, memperoleh kesempatan dan kekuasaan. Kombinasi dari komponen-komponen ini merupakan instrumen yang esensial untuk mengarusutamakan gender dalam kegiatan pembangunan (Hubeis, 2010:125-126).

Upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan tak lepas dari prinsip-prinsip yang dianut dalam model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang sangat membutuhkan peran serta seluruh masyarakat termasuk kaum perempuan. Menurut Bryson dalam Nugroho (2011:170-171) mengemukakan ciri-ciri pembangunan dengan prinsip pengembangan masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Bersifat lokal dan mengandalkan prakarsa setempat.
2. Dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
3. Mengandalkan swadaya dan peran serta masyarakat setempat.
4. Sangat memerhatikan unsur manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sen dalam Nugroho (2008:1) menegaskan bahwa pembangunan pada dasarnya dan pada akhirnya adalah membebaskan individu-individu secara setara untuk mengembangkan kualitas diri dan kelompoknya.

Lebih lanjut, Snyder dalam Nugroho (2011:XX-XXI), mengedepankan isu bahwa tujuan atau politik pembangunan adalah mengentaskan manusia dari kemiskinan, dan manusia itu adalah manusia laki-laki dan manusia perempuan.

1.5.8 Kendala Perempuan Untuk Setara dengan Laki-laki

Dalam sosiologi, wanita sebagai suatu objek studi banyak diabaikan. Hanya di bidang perkawinan dan keluarga perempuan dilihat keberadaannya. Kedudukan perempuan dalam sosiologi, dengan kata lain, bersifat tradisional

sebagaimana ditugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar: tempat kaum perempuan adalah di rumah (Ehrlich, dalam Ollenburger dan Moore, 1996:1).

Wanita dikemukakan hanya di dalam peranan keluarga mereka, karena keluarga dipandang sebagai sebuah institusi yang menunjukkan proses-proses sosial yang lebih besar. Umpamanya, dari analisis-analisis paling awal tentang masyarakat, keluarga adalah unit masyarakat yang paling fundamental, sama dengan konsep biologi mengenai sel. Wanita diperbincangkan hanya dalam hubungan mereka terhadap unit tersebut. Filosof Italia, Giambattista Vico dalam Ollenburger dan Moore (1996:2) mengemukakan bahwa:

“Laki-laki rata-rata memuaskan nafsu kebinatangannya dan meninggalkan keturunan mereka, dan mereka mengagungkan kesucian perkawinan dari mana keluarga-keluarga didirikan. Para ayah rata-rata gelisah tanpa mengendalikan kekuasaan paternalnya terhadap klien mereka, dan mereka menundukkan dirinya kepada kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dari mana kota-kota didirikan”.

Menurut Comte dalam Ollenburger dan Moore (1996:2-3), perempuan “*secara konstitusional*” bersifat interior terhadap laki-laki, karena kedewasaan mereka berakhir pada masa kanak-kanak. Karena itu, Comte menegaskan bahwa perempuan menjadi subordinat laki-laki manakala mereka menikah. Perceraian ditiadakan bagi wanita, sebab secara sederhana mereka adalah budak laki-laki manja.

Di dalam keluarga, perempuan kehilangan otoritas terhadap laki-laki, atau laki-laki dianggap memegang otoritas karena keluarga membutuhkan seorang “pemimpin” (Lehmann dalam Ollenburger dan Moore (1996:7). Otoritas ini

meliputi kontrol atas sumber-sumber ekonomi dan suatu pembagian kerja secara seksual di dalam keluarga yang menurunkan derajat perempuan menjadi interior, anak buah, serta peran-peran sosial yang berlandaskan pada perbedaan inheren dalam kemampuan dan moralitas sosial.

Kandal dalam Ollenburger dan Moore (1996:7) menyatakan penyebab penindasan perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka secara individual atau kelompok. Cara pemecahan untuk mengubahnya, yaitu menambah kesempatan-kesempatan bagi perempuan, terutama melalui institusi-institusi pendidikan dan ekonomi. Apabila, perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing, mereka akan berhasil.

Rosseau dalam Ollenburger dan Moore (1996:22), menegaskan suatu rasionalitas, bahwa “laki-laki” (*man*) mempunyai kapasitas akal-budi untuk menguasai seluruh “kehidupan manusia” (*mankind*); tetapi wanita, berdasarkan sifat-sifatnya mesti dibatasi pada pendidikan dan tugas-tugas rumah tangga.

Mary Wollstonecraft, Aphra Behn, menekankan bahwa wanita juga memiliki kapasitas akal-budi, karena itu, mesti mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki. Wollstonecraft lebih jauh menegaskan, bahwa rendahnya intelektual wanita terjadi akibat kurangnya kualitas pendidikan yang dihasilkan di dalam kesempatan-kesempatan yang tidak merata (Spencer dalam Ollenburger dan Moore, 1996:22).

Mill melacak penyebab-penyebab penindasan wanita pada kebiasaan sikap pria secara individual. Di sini fokusnya adalah para laki-laki penindas pendidikan

moral mereka yang tidak benar membuat mereka mengembangkan nafsu-nafsu mementingkan diri untuk berkuasa. Hal ini menciptakan “manusia berpolitik” (*political man*), dengan keinginan-keinginan untuk berkuasa dalam politik, ekonomi, dan hubungan-hubungan keluarga. Cara pemecahan Mill untuk penindasan wanita ialah melalui hukum dan moral. Ia mengusulkan peningkatan pendidikan bagi wanita, dan memohon belas kasihan dari laki-laki.

Mill beranggapan bahwa secara individual, pria meraih status sosial dan ekonomi mereka dalam persaingan bebas satu sama lain di dalam suatu masyarakat kapitalis. Karena itu, wanita harus pula memiliki kesempatan untuk meraih status melalui usaha-usaha mereka, yakni, suatu hak untuk bersaing, dengan menekankan pada hak-hak persamaan dalam hukum dan akses.

Mill menganggap bahwa kompetisi yang adil akan membawa pada persamaan, meskipun ia mengabaikan kendala-kendala struktural lain, seperti kurangnya keamanan, dan dapat dicapainya kontrol kelahiran, atau kemudahan yang terus berlangsung bagi wanita untuk mendapat serangan seksual, baik di rumah maupun di tempat umum. Akhirnya, Mill menyatakan bahwa *sifat-sifat* wanita mencakup suatu kekurangmampuan untuk berpikir abstrak dibandingkan dengan laki-laki. Ia menegaskan bahwa peranan-peranan lelaki-perempuan itu saling mengisi di dalam hubungan-hubungan ideal bagi pria dan wanita (Schwendinger dan Schwendinger dalam Ollenburger dan Moore, 1996:22-23).

Menurut Agger dan Rothanberg dalam Ollenburger dan Moore (1996:27) sifat-sifat mendasar penindasan perempuan lebih besar daripada bentuk-bentuk penindasan lain (ras, kelas) dalam berbagai hal:

1. Secara historis, perempuan merupakan kelompok pertama yang ditindas.
2. Penindasan perempuan ada di mana-mana, dalam semua masyarakat.
3. Penindasan perempuan adalah bentuk penindasan yang paling sulit dilenyapkan, dan tidak akan bisa dihilangkan melalui perubahan-perubahan sosial lain, seperti penghapusan kelas masyarakat.
4. Penindasan perempuan menyebabkan penderitaan yang paling berat bagi korban-korbannya; meskipun penderitaan ini barangkali berlangsung tanpa diketahui.
5. Penindasan perempuan memberikan suatu model konseptual untuk memahami semua bentuk penindasan lain.

Shulamith Firestone dalam Ollenburger dan Moore (1996:28), memperlihatkan bahwa penindasan wanita itu memiliki dasar biologis, sebab wanita terikat pada proses-proses melahirkan dan membesarkan anak-anak, yang terus menerus menempatkan mereka pada posisi-posisi ketergantungan terhadap laki-laki untuk bertahan hidup. Firestone menyerukan kepada gerakan wanita untuk berpartisipasi dalam suatu “revolusi biologis”, yang dapat membebaskan mereka dari penindasan biologis. Ia juga berpendapat bahwa analisis mengenai penindasan wanita, memberi kita peralatan untuk memahami semua bentuk penindasan lain, termasuk rasisme dan kelas-isme.

Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* (1952-1974) membicarakan bagaimana laki-laki telah mendefinisikan dirinya sebagai “diri sendiri” (*the self*), dan wanita sebagai “orang lain” (*the other*). Dari dikotomi inisial ini, wanita tidak cuma beda dengan laki-laki, tetapi juga inferior terhadap laki-laki. Menurut Tong,

“apabila wanita (*the other*) terbebas dari ancaman itu, ia mesti mensubordinasikan wanita (*the other*) tersebut.

De Beauvoir menyarankan jika perempuan menginginkan berhenti menjadi jenis kelamin kedua, yakni sebagai “orang lain”, ia mesti mengatasi kekuatan-kekuatan di sekitarnya. De Beauvoir menganjurkan tiga strategi, *pertama*: ia mesti bekerja, meskipun pekerjaan di dalam sistem kapitalis bersifat eksploitatif dan menindas. Hanya melalui pekerjaan, perempuan akan mampu mengontrol nasib sendiri. *Kedua*: perempuan perlu menjadi intelektual sebab aktivitas intelektual meliputi aspek berpikir, mencari, dan mendefinisikan, sebagai lawan dan dipikirkan, dicarikan dan didefinisikan. *Ketiga*: perempuan berusaha menjadi sosialis yang mentransformasikan masyarakat yang akan membantu menanggapi konflik-konflik subjek/objek dan diri sendiri/orang lain (Tong, 1989:210-211).

1.5.9 Pengarusutamaan Gender dan Model Analisis Gender

Upaya peningkatan peran perempuan telah menjadi suatu gerakan global yang menembus batas-batas nasionalitas dan lingkungan sosial budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan bukan lagi menjadi milik perempuan, ataupun milik nasionalitas tertentu, akan tetapi telah menjadi milik kemanusiaan (Tjokrowinoto dalam Nurhaeni, 2009: 7).

Gender mainstreaming atau pengarusutamaan gender adalah pematangan dari strategi gender dan pembangunan yang tujuan dasarnya adalah menjadikan

gender sebagai arus utama pembangunan. Dengan strategi ini maka setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh institusi negara maupun setiap aksi yang dilakukan oleh masyarakat harus menjadikan gender sebagai arus utama sehingga kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dapat terwujud (Nurhaeni, 2009:9).

Pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*, GMS) didefinisikan oleh UN ECOSOC (*United Nation Economic and Social Council*) pada tahun 1997 sebagai berikut:

“Pengarusutamaan gender adalah penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan”. (Makarao, 2009:36).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi perempuan. Dengan demikian, diperlukan pembinaan peran perempuan agar

mampu meningkatkan peran dan potensi mereka, terutama produktivitasnya melalui pemberdayaan mereka di segala bidang. Nurhaeni (2009:74), mengemukakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Melalui pengarusutamaan gender dapat dikembangkan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Cara itu diniscayakan dapat menghilangkan kesenjangan gender yang pada gilirannya membuahkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai muaranya, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender itu dapat dijadikan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan. Dengan demikian tercapainya kesetaraan dan keadilan gender itu dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya (Nugroho, 2011:59-60).

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Menurut Molyneux dalam Mosse (1993:216), kebutuhan praktis gender adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang sifatnya untuk memperbaiki kondisi mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan serta peran-peran sosial mereka secara layak dan bermartabat. Karena yang hendak dicapai adalah perubahan kondisi, maka pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender ini umumnya bersifat merespon

kebutuhan jangka pendek seperti pemberian modal usaha, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, pemberantasan buta aksara dan lain-lain.

Menurut Maxine Molyneux dalam Mosse (1996:216), setiap kegiatan pembangunan seharusnya mampu memberi manfaat bagi kaum perempuan sehingga mampu memenuhi dua kebutuhan gender, yaitu:

1. Kebutuhan praktis gender, yaitu program yang diberikan mampu meningkatkan fungsi atau peran mereka tanpa memberi perubahan pada posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan perempuan yang diidentifikasi, dalam hal ini para perempuan diberi kesempatan untuk memberikan ide atau inisiatif mengenai program apa yang paling sesuai untuk dilakukan menurut kebutuhan mereka.
2. Kebutuhan strategis gender, yaitu bahwa program yang diberikan berguna untuk memenuhi relasi gender antara laki-laki dan perempuan, dimana terjadi perubahan yang memberi rasa keadilan dalam relasi keduanya. Hal ini berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam pembagian kerja, akses dan kontrol dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, apa pun bentuk kegiatan yang diusahakan dan siapa pun sasaran yang akan dilibatkan, inti dari kegiatan itu umumnya mengacu pada terjadinya perubahan di dalam pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya. Kegiatan yang umumnya dikategorikan sebagai memenuhi kebutuhan strategis gender itu adalah perubahan peraturan hukum,

penafsiran ulang atas ajaran agama yang dianggap mensubordinasikan perempuan, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kesetaraan upah untuk jenis pekerjaan yang sama dengan mempertimbangkan dan menghormati fungsi-fungsi reproduksi perempuan, dan lain-lain (Nugroho, 2008:96).

Guna mengupayakan pengarusutamaan gender itu diperlukan alat analisis gender. Dengan menggunakan analisis gender dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan, maka dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan: memperoleh akses yang adil dan setara terhadap sumber daya pembangunan, berpartisipasi secara seimbang dan adil dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang adil dan setara terhadap sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Beberapa model yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli untuk menganalisis pengarusutamaan gender, yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Model Harvard

Model Harvard dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development* bekerja sama dengan Kantor *Women in Development* (WID)-USAID. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi *Women in Development* atau perempuan dalam pembangunan yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal. Model analisis Harvard

lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar.

Teknik ini sering disebut sebagai *Gender Framework Analysis* (GFA), yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan, yang mengutarakan perlunya tiga komponen dan interelasi satu sama lain, yaitu: profil aktivitas, profil akses dan profil kontrol (Overholt dalam Handayani dan Sugiarti, 2001:155).

2. Teknik Analisis Model Moser

Model Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis, kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat. Terdapat kelemahan dalam model ini yang tidak memperhitungkan kebutuhan strategis laki-laki.

Teknik analisis Moser adalah suatu teknik analisis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender, dengan menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), identifikasi terhadap peranan majemuk perempuan (reproduksi, produksi, sosial kemasyarakatan), serta identifikasi kebutuhan gender praktis dan strategis (Handayani dan Sugiarti, 2001:162).

3. Teknik Analisa atau Model ProBA (*Problem Base Approach*) atau Analisis Berbasis Masalah

Model ProBA (*Problem Base Approach*) yang dikembangkan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten atau kota, teknik ini sedikit berbeda dengan *Gender Analysis Pathway*. Analisis ProBA (*Problem Base Approach*) ini lebih menekankan pada identifikasi masalah kesenjangan gender dalam merumuskan program intervensi pemerintah yang tepat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam ProBa (*Problem Base Approach*) meliputi, (a) analisis masalah gender, (b) telaahan kebijakan atau program atau kegiatan pembangunan, (c) penerapan kebijakan, tujuan dan program pokok baru yang responsif gender, (d) penyusunan rencana aksi dan kegiatan intervensi, (e) rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

4. Teknik Analisa atau Model GAP (*Gender Analysis Pathway*)

Model GAP (*Gender Analysis Pathway*) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan (Nurhaeni, 2009).

Model GAP (*Gender Analysis Pathway*) merupakan metode yang telah banyak dikembangkan di Indonesia terutama dalam proses perencanaan

program-program yang responsif gender. Metode GAP (*Gender Analysis Pathway*) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan yang menjadi pokok bahasan, mulai dari aspek kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

5. Empat indikator pemberdayaan menurut Katjasungkana. Konsep pemberdayaan ditemukan di dalam konteks kesetaraan gender. Pada prinsipnya, untuk membangun kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, diperlukan pertama kali pemberdayaan bagi kaum perempuan. Katjasungkana dalam Nugroho (2011:XXI) mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan, antara lain:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

1.5.10 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

1. Kebijakan Pokok

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang berdimensi atau dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008:1).

Visi dan misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah

kemiskinan. Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

2. Tujuan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi:

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.

- d. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
 - e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
 - f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
 - g. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
3. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan pedoman umum, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu Pada Pembangunan Manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

- b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.

- f. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
- j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan prinsip yang dimilikinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan setidaknya merupakan program yang paling penting untuk masyarakat agar secara aktif menghapuskan hal-hal yang menghambat kesetaraan gender dan karenanya juga akan meningkatkan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Arti penting Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari potensinya secara nasional untuk: (a) menanggapi kebutuhan praktis gender perempuan, (b) meningkatkan potensi perempuan dalam kegiatan ekonomi, (c) menjamin partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Perempuan diharapkan berpartisipasi dalam proses kegiatan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai pengusul, pengambil keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemelihara, dan sekaligus penerima manfaat (Buku Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan Program Pengembangan Kecamatan, 2002: 3).

a. Perempuan Sebagai Pengusul

Perempuan mengajukan usulan kegiatan untuk mengatasi persoalan dan memenuhi kebutuhan prioritas mereka.

b. Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan

Perempuan hadir dan mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

c. Perempuan Sebagai Pelaksana Kegiatan

Perempuan dapat ikut berperan sebagai tenaga kerja, anggota tim pelaksana kegiatan, atau anggota unit pengelola kegiatan, sesuai keinginan dan kemampuannya.

d. Perempuan Sebagai Pemelihara

Perempuan ikut memelihara hasil pembangunan sarana dan prasarana.

e. Perempuan Sebagai Penerima Manfaat

Perempuan bisa menjadi penerima modal usaha maupun menikmati hasil pembangunan prasarana yang menggunakan sumberdaya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan maupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

4. Sasaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan

Lokasi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan. Kelompok sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah masyarakat miskin perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kelembagaan pemerintahan lokal.

5. Ketentuan Dasar Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Ketentuan dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi:

1. Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

2. Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: (a) lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (b) berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, (c) dapat dikerjakan oleh masyarakat, (d) didukung oleh sumber daya yang ada, (e) memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

3. Mekanisme usulan kegiatan. Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan tersebut adalah:

a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ini maksimal 25% dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

4. Swadaya masyarakat. Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam

pelaksanaan tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

5. Kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.
6. Jenis Kegiatan yang Dilarang (*Negative List*). Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik. Kegiatan ini dilarang dengan alasan bahwa hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum.

b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.

Pembangunan kantor pemerintah adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan tempat ibadah terbatas hanya untuk golongan tertentu saja atau kelompok agama tertentu saja, padahal dalam satu desa dan kecamatan terdiri dari beberapa pemeluk agama. Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah seluruh penduduk yang ada di desa atau kecamatan lokasi program.

c. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang dapat merusak alam. Seperti *chainshaw* biasa dipakai untuk menebang pohon di hutan, bahan peledak alam mengganggu keamanan dan kerusakan lingkungan, asbes dapat mengganggu kesehatan antara lain menjadi penyebab kanker paru-paru. Pestisida serta sejenisnya dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia, dan lain-lain.

7. Sanksi. Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Alur kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat, sebesar Rp. 1 milyar sampai Rp. 3 milyar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia

6. Alur Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Menurut buku petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, alur kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Pertama, tahap perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten.

Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan ini untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan seluruh pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan lainnya.

7. Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

Menurut buku petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan

sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) untuk masing-masing kecamatan maksimal 25% dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Yang menjadi sasaran program kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok yang sudah ada di masyarakat, seperti kelompok pengajian. Bentuk dari kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai usaha.

1.5.11 Tinjauan Pustaka

Delfiazi Puji Lestari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai Kebijakan Pro Gender di Kecamatan Teluk Gelam Ogan Komering Ilir” mengungkapkan bahwa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai kebijakan pro gender telah berjalan, namun belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan sebagai kebijakan pro gender ini dikarenakan masyarakat perempuan yang memang enggan ikut serta secara total dalam

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan. Hal ini disebabkan perempuan masih memegang teguh anggapan bahwa dalam masyarakat peran kaum lelaki lebih utama daripada kaum perempuan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Meilia Sari (2013) yang berjudul "Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir", mengungkapkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan musyawarah antar desa sosialisasi, musyawarah desa sosialisasi, musyawarah khusus perempuan, pengajuan proposal, tahapan verifikasi, musyawarah prioritas usulan, musyawarah antar desa penetapan usulan, serta tahapan pencairan dan pengembalian dana pinjaman sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Namun pada pelaksanaan belum begitu optimal.

Berbeda dengan penelitian yang ada, penelitian ini sendiri akan mempertegas dan melengkapi penelitian yang telah ada. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Yang Kedua, bagaimanakah bentuk pengarusutamaan gender dilihat dari aspek akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Yang ketiga, bagaimanakah pengarusutamaan

gender pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dalam tinjauan pemenuhan kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis perempuan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam sosiologi, wanita sebagai suatu objek studi banyak diabaikan. Hanya di bidang perkawinan dan keluarga perempuan dilihat keberadaannya. Kedudukan perempuan dalam sosiologi, dengan kata lain, bersifat tradisional sebagaimana ditugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar: tempat kaum perempuan adalah di rumah (Ehrlich, dalam Ollenburger dan Moore, 1996:1).

Namun, dalam gender, kaum perempuan mempunyai atau menjalankan tiga peran gender. Menurut Ann Oakley dalam Nugroho (2008:32), mengatakan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Ia mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.

Secara umum gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki atau perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Menurut Oakley dalam Fakhri (2001:71), gender berarti:

“Perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavior differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ketentuan Tuhan. Melainkan diciptakan manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang”.

Peran gender adalah peran ekonomi dan sosial yang dipandang layak oleh masyarakat untuk diberikan kepada laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai berbagai macam peran di dalam masyarakat. Namun kaum laki-laki biasanya memfokuskan diri hanya pada perannya sebagai pencari nafkah, sementara kaum perempuan harus mengerjakan ketiga peran tersebut sekaligus. Apabila perempuan tidak bisa mengerjakan ketiga peran tersebut, maka akan dituding gagal dalam melaksanakan kewajibannya. Ketiga peran gender perempuan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Peran Produktif

Peran ini berhubungan dengan segala aktifitas dan pekerjaan yang menghasilkan uang, seperti: bertani, berdagang, pembantu rumah tangga, bekerja di kantor, dan berbagai pekerjaan lainnya. Namun sebagian besar upah yang diperoleh kaum perempuan jauh lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki untuk pekerjaan yang sama beratnya. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi tawar perempuan dan kesempatan mereka yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji lebih tinggi, artinya perempuan tersebut harus bekerja di luar rumah.

2. Peran Reproduksi

Peran ini berhubungan dengan peran perempuan untuk mengurus rumah tangga dan mensejahterakan keluarga, termasuk hamil, melahirkan, merawat anak, mengurus anggota keluarga yang sakit, dan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti: memasak, mencuci dan mengangkat air. Pekerjaan ini tidak menghasilkan uang dan sangat sulit diukur. Namun tidak pernah dianggap suatu pekerjaan. Karena dilihat sebagai tanggungjawab perempuan semata. Padahal pekerjaan ini memakan waktu, menguras tenaga dan harus dikerjakan setiap hari.

3. Peran di Masyarakat (Sosial)

Peran ini berkaitan dengan keterlibatan kaum perempuan untuk ikut andil dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial. Umpamanya, menghadiri rapat, kegiatan spiritual, kebudayaan, menghibur kerabat dan sanak keluarga yang tertimpa musibah, aktif di organisasi kemasyarakatan. Peran ini melibatkan laki-laki dan perempuan, namun umumnya pengambilan keputusan selalu berada di tangan laki-laki (Makarao, 2009:17-18).

Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan perbedaan gender. Hal ini mengakibatkan laki-laki dan perempuan mengalami ketidakadilan gender, terutama kaum perempuan. Budaya patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, yaitu yang berkuasa dalam keluarga adalah bapak. Patriarki menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. Patriarki adalah

konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Hal tersebut mengakibatkan munculnya anggapan-anggapan di masyarakat yang akan menguntungkan kaum laki-laki. Perempuan dinilai hanya berfungsi untuk memasak, berhias dan melahirkan anak. Maka, perempuan dipandang lebih cocok atau pantas berada di wilayah domestik atau rumah tangga untuk mengerjakan berbagai pekerjaan di dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga lainnya. Adanya kepercayaan di dalam masyarakat yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu semata-mata perempuan dipandang dari segi jenis kelamin bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi secara lebih luas, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan (Handayani dan Sugiarti, 2001:4-5).

Proses pembangunan dan budaya masyarakat telah menimbulkan persoalan bagi perempuan. Perempuan dan pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi perempuan (Handayani dan Sugiarti, 2001:19). Secara ekonomi, perbedaan dan pembagian gender juga melahirkan proses *marginalisasi* perempuan. Proses marginalisasi perempuan terjadi dalam kultur, birokrasi maupun program-program pembangunan. Dalam program pertanian yang dikenal dengan Revolusi Hijau, kaum perempuan secara sistematis disingkirkan dan dimiskinkan. Dengan hanya mengakui laki-laki sebagai kepala rumah tangga, program industrialisasi pertanian secara sistematis menghalangi, tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk

mendapatkan pelatihan dalam bidang pertanian ataupun akses kredit. Perlakuan semacam itu secara tidak terasa menggeser keberadaan kaum perempuan ke garis marginal. Di sektor lain juga terjadi banyak sekali jenis aktivitas kaum perempuan yang selalu dianggap tidak produktif (dianggap bernilai rendah), sehingga mendapat imbalan ekonomis lebih rendah (Fakih, 2001:148-149).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk mengubah keadaan saat ini yang dipandang kurang baik menuju ke keadaan yang dipandang lebih baik. Karena itu pembangunan perlu dirancang secara untuk memberi manfaat yang sama baiknya antar ras, suku, agama, kelompok sosial, kelompok ekonomi dan melibatkan serta memberi manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Kendati demikian pembangunan selama ini telah gagal mengakui kontribusi positif ekonomi perempuan dalam proses pembangunan. Arivia dalam Nurhaeni (2009:53) menyatakan:

“Sepanjang sejarah di belahan dunia patriarki seperti di Indonesia, representasi isu-isu perempuan di segala bidang (politik, ekonomi, budaya, agama dan sebagainya), telah dikesampingkan dan ditolak di dalam wacana publik”.

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa isu perempuan sering dikesampingkan dalam wacana publik dan perencanaan pembangunan selama ini gagal mengakui adanya kontribusi positif perempuan dalam proses pembangunan dan karena itu diperlukan suatu pendekatan baru terhadap pembangunan yang memperhitungkan peran perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Fakih dalam Nurhaeni (2009:54).

“Hampir semua teori ilmu sosial tentang pembangunan terhadap nasib berjuta-juta umat manusia telah dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender. Akibatnya pembangunan yang semboyannya untuk mensejahterakan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa dunia ketiga tersebut justru telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan”.

Upaya peningkatan peran perempuan telah menjadi suatu gerakan global yang menembus batas-batas nasionalitas dan lingkungan sosial budaya. Gerakan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan bukan lagi menjadi milik perempuan, ataupun milik nasionalitas tertentu, akan tetapi telah menjadi milik kemanusiaan (Tjokrowinoto dalam Nurhaeni, 2009:7).

Fenomena ketidakadilan gender, terutama terhadap kaum perempuan yang seringkali terjadi saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa. Karena itu, upaya yang telah dilakukan untuk pengarusutamaan gender dan pentingnya perspektif gender dalam semua bidang pembangunan dan dimensi kehidupan menjadi sebuah keniscayaan. Dari perspektif ini, kemudian diharapkan akan melahirkan bentuk kesadaran baru, yakni pemberdayaan perempuan dalam perspektif gender, yang menempatkan perempuan sama halnya dengan laki-laki dalam dimensi akses dan kesempatan berpartisipasi dan memanfaatkan pembangunan yang sama dengan laki-laki.

Selain itu, upaya pemberdayaan perempuan berspektif gender, pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi dan posisi kaum perempuan, yang saat ini masih belum mampu melepaskan diri dari perangkap budaya patriarki, kemiskinan, dan keterbelakangan. Karena itu, pemberdayaan

perempuan tetap harus diikuti dengan memperkuat potensi, daya, dan karakter yang dimiliki oleh kaum perempuan (Hubeis, 2010:ix).

Pengarusutamaan gender adalah penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender bertujuan agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi perempuan.

Dengan demikian, diperlukan pembinaan peran perempuan agar mampu meningkatkan peran dan potensi mereka, terutama produktivitasnya melalui pemberdayaan mereka di segala bidang. Nurhaeni (2009:74), mengemukakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Melalui pengarusutamaan gender dapat dikembangkan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Cara itu diniscayakan dapat menghilangkan kesenjangan gender yang pada gilirannya membuahkan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai muaranya, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender itu dapat dijadikan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan (Nugroho, 2011:59-60).

Konsep pemberdayaan ditemukan di dalam konteks kesetaraan gender. Pada prinsipnya, untuk membangun kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, diperlukan pertama kali pemberdayaan bagi kaum perempuan. Katjasungkana dalam Nugroho (2011:XXI) mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan, antara lain:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa, sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan (Hubeis, 2010:125).

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Menurut Molyneux dalam Mosse (1993:216), kebutuhan praktis gender adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang sifatnya untuk memperbaiki kondisi mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan serta peran-peran sosial mereka secara layak dan bermartabat. Karena yang hendak dicapai adalah perubahan kondisi, maka pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender ini umumnya bersifat merespon

kebutuhan jangka pendek seperti pemberian modal usaha, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, pemberantasan buta aksara dan lain-lain.

Menurut Maxine Molyneux dalam Mosse (1996:216), setiap kegiatan pembangunan seharusnya mampu memberi manfaat bagi kaum perempuan sehingga mampu memenuhi dua kebutuhan gender, yaitu:

1. Kebutuhan praktis gender, yaitu program yang diberikan mampu meningkatkan fungsi atau peran mereka tanpa memberi perubahan pada posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan perempuan yang diidentifikasi, dalam hal ini para perempuan diberi kesempatan untuk memberikan ide atau inisiatif mengenai program apa yang paling sesuai untuk dilakukan menurut kebutuhan mereka.
2. Kebutuhan strategis gender, yaitu bahwa program yang diberikan berguna untuk memenuhi relasi gender antara laki-laki dan perempuan, dimana terjadi perubahan yang memberi rasa keadilan dalam relasi keduanya. Hal ini berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam pembagian kerja, akses dan kontrol dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

Kandal dalam Ollenburger dan Moore (1996:7) menyatakan penyebab penindasan perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka secara individual atau kelompok. Cara pemecahan untuk mengubahnya, yaitu menambah kesempatan-kesempatan bagi perempuan, terutama melalui

institusi-institusi pendidikan dan ekonomi. Apabila, perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing, mereka akan berhasil.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang berdimensi atau dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008:1).

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mempunyai tujuan khusus, salah satunya yaitu meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

Lebih lanjut, program tersebut juga mempunyai prinsip dasar dalam pelaksanaannya, salah satunya ialah kesetaraan dan keadilan gender, yang berarti masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana fisik dan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP).

Dengan prinsip yang dimilikinya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan setidaknya merupakan program yang paling penting yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk secara aktif menghapuskan hal-hal yang menghambat kesetaraan gender dan karenanya juga akan meningkatkan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Arti penting Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari potensinya secara nasional untuk: (a) menanggapi kebutuhan praktis gender perempuan, (b) meningkatkan potensi perempuan dalam kegiatan ekonomi, (c) menjamin partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan akan dilihat dari empat aspek atau indikator pemberdayaan menurut Katjasungkana, antara lain sebagai berikut:

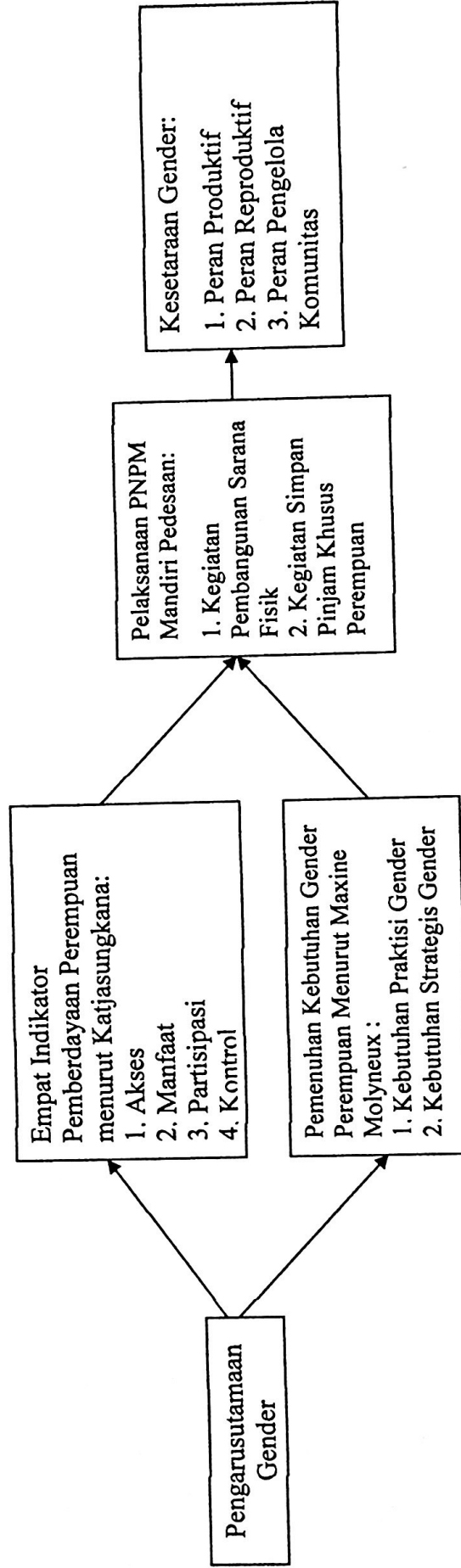
1. Aspek akses akan digunakan untuk melihat bagaimana perempuan dapat masuk dalam setiap kegiatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Aspek manfaat akan digunakan untuk melihat manfaat apa saja yang diperoleh perempuan.
3. Aspek partisipasi akan digunakan untuk melihat sejauh mana keterlibatan perempuan sebagai salah satu sumber daya di kelurahan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

4. Aspek kontrol akan digunakan untuk melihat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di Kelurahan Betung pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mampu memenuhi kebutuhan gender perempuan, akan digunakan teori menurut Maxine Molyneux. Pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup pemenuhan kebutuhan gender perempuan, yakni kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Menurut Maxine Molyneux dalam Mosse (1996:216), setiap kegiatan pembangunan seharusnya mampu memberi manfaat bagi kaum perempuan sehingga mampu memenuhi dua kebutuhan gender, yaitu:

1. Kebutuhan praktis gender, yaitu bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mampu meningkatkan fungsi atau peran kaum perempuan tanpa memberi perubahan pada posisi subordinasi perempuan dalam masyarakat.
2. Kebutuhan strategis gender, yaitu bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dapat bermanfaat untuk memenuhi relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikaji peneliti, maka jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4). mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud disini adalah metode deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai bentuk pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Metode deskriptif dapat mengungkap kondisi riil yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden values*) dari seluruh dinamika masyarakat. Karena pada dasarnya penelitian ini akan menggambarkan dan melakukan eksplorasi secara mendetail mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, metode penelitian deskriptif yang mengartikulasikan hasil penelitian dalam bentuk data deskriptif (kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti) akan lebih bermakna serta meyakinkan para penyelenggara program daripada pembahasan melalui angka-angka.

Metode deskriptif dipilih karena ingin memperoleh gambaran atau deskripsi fenomena yang terjadi dalam pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Kategorisasi data didasarkan pada konteks pemahaman bentuk pengarusutamaan gender. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, bentuk Pengarusutamaan Gender dilihat dari aspek akses, manfaat, partisipasi dan kontrol dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan serta tinjauan pemenuhan kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Penelitian deskriptif ini merupakan upaya pendeskripsian fenomena-fenomena dalam penelitian. Fenomena-fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuasin mengingat bahwa Kabupaten Banyuasin ditetapkan sebagai salah satu dari enam kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan selain Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat, Musi Rawas dan Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Serta mengingat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dilaksanakan hampir di seluruh kecamatan di Indonesia. Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kondisi geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin terdiri dari kawasan rawa pasang surut. Beberapa faktor yang menyebabkan ketertinggalan di daerah Kabupaten Banyuasin selain karena faktor geografi adalah karena masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Betung, tepatnya di Kelurahan Betung. Kecamatan Betung mengalami pemekaran pada kelurahannya, yaitu Kelurahan Rimba Asam yang dimekarkan menjadi Kelurahan Betung pada tahun 2007. Kelurahan Betung mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak yang ada di Kecamatan Betung, yakni penduduk laki-laki berjumlah 9.006 jiwa dan perempuan berjumlah 8.328 jiwa, dengan potensi jumlah penduduk perempuan usia produktif sebanyak 5.053 jiwa. Selain itu, penelitian mengenai pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin belum pernah dilakukan.

Masyarakat di Kelurahan Betung masih mengalami kesulitan sumber air bersih, dan juga belum diadakan sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang baik bagi masyarakat di Kelurahan Betung. Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai program pembangunan nasional menjalankan kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana fisik bagi masyarakat di Kelurahan Betung, terutama perhatian kepada usulan penyediaan air bersih yang sangat diperlukan bagi kaum perempuan dalam menunjang peran reproduktifnya dalam kehidupan keluarga.

Selain daripada itu, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung juga diadakan melalui kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang diharapkan akan mampu membantu masyarakat dalam memperoleh kemudahan pinjaman bagi peningkatan jenis usaha yang dijalankan oleh rumah tangga. Karena memang, Kelurahan Betung unggul dalam bidang perdagangan apabila dibandingkan dengan kelurahan maupun desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

1.7.3 Definisi Konsep

1. Pengarusutamaan gender adalah penerapan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan dan program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender bertujuan agar pelaksanaan

program-program pembangunan dapat mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, yaitu dengan terciptanya kendali serta manfaat bagi perempuan.

2. Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan adalah kegiatan pemberian permodalan untuk kaum perempuan yang mempunyai kegiatan usaha.
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mendukung kesetaraan gender dan dilaksanakan melalui penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat.

1.7.4 Strategi Penelitian

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik, yang merupakan usaha penelitian untuk mengetahui dan memahami lebih mengenai pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, studi kasus ini tidak dimaksudkan untuk membangun teori, tetapi lebih mengkaji secara mendalam.

1.7.5 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi dan individu. Organisasi yaitu unit pengelola kegiatan kelurahan yang menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Sedangkan individu adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

1.7.6 Penentuan Informan dan Key Informan

Informan penelitian ialah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada representasi fenomena sosial dan dalam rangka memperoleh informasi akurat, maka data primer diperoleh dari informan. Key informan ialah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini yaitu Fasilitator Kecamatan. Sedangkan informan lainnya ialah sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah (Orang)
1.	Camat Kecamatan Betung	1 orang
2.	Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PjOK)	1 orang
3.	Lurah Kelurahan Betung	1 orang
4.	Fasilitator Kecamatan	2 orang
5.	Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	3 orang
6.	Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penulis Usulan	3 orang
7.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	2 orang
8.	Masyarakat Perempuan Penerima Bantuan Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan	8 orang
9.	Masyarakat Laki-laki Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik	1 orang
Jumlah		22 orang

Sumber: Diolah Dari Data Primer

Informan ialah orang yang diwawancarai, dimintasi informasi oleh pewawancara. Informan adalah yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007:108). Teknik penentuan sampel untuk penetapan informan dilakukan dengan memakai teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono (2009:85), *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dipakai dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini ingin menjelaskan dan menggambarkan pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka masyarakat yang dipilih sebagai informan adalah masyarakat perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Pemilihan dilakukan pada satu kelurahan yaitu Kelurahan Betung berdasarkan pertimbangan bahwa di Kelurahan Betung karena paling banyak

terdapat perempuan yang berada pada usia produktif. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap, selain menggunakan teknik *sampling purposive*, peneliti juga menggunakan *snowball sampling*. Sugiyono (2009:86) mengatakan bahwa penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel *purposive* dan *snowball*. Pertama dipilih lima orang perempuan untuk memberikan data, kemudian karena peneliti merasa data yang dipilih kurang, maka diadakan penambahan jumlah informan, hingga mencapai jumlah tiga belas orang perempuan.

Dalam penelitian ini informan dipilih secara *purposive* yakni ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, berdasarkan kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

1. Perempuan sebagai pengurus kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Perempuan sebagai penerima bantuan kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Masyarakat perempuan yang dipilih sebagai informan yaitu kaum perempuan yang berusia tiga puluh (30) tahun hingga lima puluh delapan (58) tahun dan berjenjang pendidikan berbagai tingkatan yakni mulai dari tamat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), hingga jenjang Sarjana Sains (S.Si).

3. Berlokasi di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

1.7.7 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006:157), mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sugiyono (2009:224-225), mengatakan bahwa pengumpulan data bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

1. Data Primer

Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*). Esterberg dalam Sugiyono (2009:231), mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Susan Stainback dalam Sugiyono (2009:232), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengintegrasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Data primer tersebut selain didapat dari informan utama yang menjadi subjek dalam penelitian ini, juga didapat dari beberapa informan pendukung yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi untuk mendeskripsikan fenomena penelitian mengenai pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

Dalam hal ini, peneliti menemui para informan bukan dengan mengedarkan kuesioner terstruktur, namun dengan suatu pedoman wawancara. Kemudian pemahaman terhadap deskripsi dilakukan dengan mendasarkan pada data-data pedoman wawancara (*indepth interview*) terhadap pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menunjang penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka berupa bahan-bahan literatur kepustakaan, laporan penelitian, karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari organisasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung

Kabupaten Banyuasin, sehingga dapat menambah pemahaman sesuai dengan fokus penelitian.

1.7.8 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maka dibutuhkan data-data untuk diolah dan dijadikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Menurut Lofland dan Lofland dalam Sugiyono (2009), dalam melakukan pengumpulan data yang merupakan bagian dari sebuah proses penelitian kualitatif, seorang peneliti harus melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yakni: pertama adalah proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), kedua adalah ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*), dan yang ketiga adalah keluar dari lokasi penelitian (*getting out*).

1. *Getting in*, merupakan proses memasuki lokasi penelitian dan mengurus administrasi yang berkaitan dengan proses penelitian. Peneliti mempelajari dokumen tentang penjelasan umum atau pedoman umum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, selain itu meliputi pengurusan surat izin penelitian. Hal tersebut dilakukan agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan sesuai rencana, dalam maksud mendapat izin untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan guna menunjang dalam menganalisis data, serta mendapatkan izin dalam rangka penelitian dari pihak lembaga kecamatan, lembaga kelurahan, dan organisasi pengelola pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan

Betung kabupaten Banyuasin. Peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal, serta harus mampu menjalin hubungan yang akrab dengan informan.

Untuk itu agar diperoleh suatu data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak antara peneliti dengan para informan. Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan bertindak. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki tempat penelitian.

2. *Getting along*, merupakan proses interaksi antara peneliti dengan para informan yang berkaitan dengan penelitian. Aktivitas ini diperlukan untuk menunjang dan mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih mendalam, sehingga data yang nantinya didapat tidak hanya berkisar pada permukaan saja (*surface*) tetapi dapat mendapatkan data yang bersifat substansi. Selama penelitian berlangsung, peneliti akan mengadakan observasi dan wawancara dengan *key* informan secara *purposive* dengan observasi sebagai langkah awal. Peneliti ingin memahami bagaimana dari segi bentuk pengarusutamaan gender, akan dilihat dari aspek akses, manfaat, partisipasi dan kontrol. Pada waktu peneliti memasuki lokasi penelitian dan berhasil menjalin hubungan yang baik dengan informan, maka hubungan yang terjalin harus tetap dipertahankan. Kedudukan subjek (informan utama dan informan pendukung) harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk mengemukakan semua persoalan, data, serta informasi yang diketahui.

3. *Getting out*, merupakan tahap akhir dalam proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan sebanyak mungkin dan mendalam kepada informan. Apabila dari hasil wawancara tersebut peneliti telah mendapatkan informasi yang mendapatkan kesamaan pada informan, atau peneliti tidak lagi menemukan informasi atau jawaban yang baru lagi atau berbeda dengan jawaban-jawaban sebelumnya, maka proses pengumpulan data dihentikan karena sudah dianggap jenuh. Situasi ini ditandai dengan datanya yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda. Dengan demikian, proses pengumpulan data dapat dikatakan selesai untuk selanjutnya dilakukan proses analisis data.

Untuk keperluan analisa data, ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi (pengamatan)

Usman dan Akbar (2004:54), mengatakan observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Yaitu deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti serta gambaran empirik tentang data-data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai fenomena, keadaan, tindakan dan peristiwa yang terjadi di lapangan berkaitan dengan objek penelitian. Hal-hal yang akan diamati dalam penelitian ini antara lain tahap-tahap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan,

keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

2. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Dengan menggunakan teknik observasi, tentu saja tidak akan memberikan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan mengingat cara ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Maka dari itu, informasi juga akan dikumpulkan dengan teknik wawancara, baik wawancara berstruktur maupun yang tidak berstruktur. Usman dan Akbar (2004:57), mengatakan bahwa wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang tidak berstruktur memberikan kebebasan bagi informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan dan perasaannya tanpa diatur oleh peneliti. Sedangkan wawancara yang berstruktur ialah berupa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang berupa pedoman wawancara.

(Bungin, 2007:108), mengemukakan bahwa wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dengan kehidupan informan.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara secara mendalam, dengan mempergunakan pedoman wawancara diharapkan dapat menggali, dan

memperoleh informasi secara lengkap, yaitu berupa jawaban-jawaban, ataupun perilaku yang tampak dari subjek yang diteliti. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan utama dan informan pendukung dalam hal ini masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memahami pengarusutamaan gender dalam kegiatan simpan pinjam khusus perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti literatur kepustakaan (berupa buku-buku), buku petunjuk pelaksanaan (juklak) Program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan, buku petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan, dokumen kebijakan Kabupaten Banyuasin tentang penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, laporan penelitian, karya ilmiah, dan data-data yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1.7.9 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas. Dalam penelitian ini gambaran bentuk pengarusutamaan gender diperoleh melalui empat indikator pemberdayaan perempuan menurut Katjasungkana, yaitu yang meliputi aspek akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol. Sedangkan tinjauan pemenuhan kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender, akan digunakan teori menurut Maxine Molyneux.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:249), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. *Data*

display (penyajian data) merupakan proses penyusunan data dimana peneliti membatasi penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif dari hal-hal yang bersifat umum kekhusus. Artinya, data dari informan disajikan dalam bentuk cerita.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (menarik kesimpulan atau verifikasi)

Conclusion Drawing/Verification (menarik kesimpulan atau verifikasi) merupakan proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan keputusan dari hasil analisis sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Kecenderungan hasil penelitian diidentifikasi kembali dan diperjelas kembali agar didapat kesimpulan akhir yang kredibel. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tertentu secara rinci dengan alasan:

1. Mampu menggali informasi yang lebih luas, lebih detail, mendalam, dari beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Informasi yang ingin digali disini adalah mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam pelaksanaann Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin serta relasinya dengan lingkungan dan budaya.
2. Analisis deskriptif kualitatif dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian sehingga kajian yang diperoleh

diharapkan dapat mengembangkan konsep. Konsep yang ingin dikembangkan disini adalah pengarusutamaan gender dalam pelaksanaannya.

1.7.10 Teknik Triangulasi dengan Sumber Data

Menurut Patton dalam Bungin (2007:256-257), mengemukakan bahwa triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

Menurut Moleong dalam Bungin (2007:257), bahwa triangulasi sumber data juga memberikan kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden.
2. Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data.
3. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.
4. Memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data.
5. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggar, A.M. and P.S. Rothenberg. 1984. *Feminist Frameworks Alternative Theoretical Accounts*. New York: McGraw-Hill.
- Anwar, Desi. 2004. *Kamus Lengkap 10 Milliard*. Surabaya: Amelia.
- Bahartha, Dewi S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- Bodgan, Robert dan Taylor Steven J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. Ohio.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Comte, R. 1954/1877. *Systems of Positive Polity IV*. London: Longman Green.
- Darwin, Muhadjir. 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.
- De Beauvoir, S. 1952/1974. *The Second Sex*. New York: Vintage Books.
- Ehrlich, C. 1971. "The Male Sociologist's Burden: The Place of Women in Marriage and Family Texts." *Journal of Marriage and The Family*.
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Firestone, S. 1970. *The Dialectic of Sex*. New York: Bantam Books.
- Glover, David, and Cora Caplan. 2000. *Genders*. London: Routledge.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2001. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Kartasasmita. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gagas Media.
- Lehmann, J.M, 1990. "Durkheim's Women: Sexist Ideology at the Heart of Sociological Theory". *Current Perspectives in Social Theory*.
- Levy Jr., Marion J. 1952. *The Structure of Society*. Princeton: Princeton University Press.
- Lips, Hillary M. 1993. *Sex an Gender: An Introduction*. London: Mayfield Publishing Company.

- Lindsey, Linda L. 1990. *Gender Roles: a Sociological Perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lofland, John & Lyn H. Lofland. 1984. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing Company.
- Makarao, Nurul Ramadhani. 2009. *Gender dalam Bidang Kesehatan*. Jakarta: Alfabeta.
- Miles, Matthew B & Huberman, A. Michael. 1984. *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publications.
- Moleong, Rexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Molyneux, M. 1985. *Mobilization without Emancipation? Women's interests, state and revolution in Nicaragua*. Feminist Studies.
- Mosse, Julia Cleves. 2003. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Penjelasan Petunjuk Teknik Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Jakarta.
- Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Jakarta.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender. 2005. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Universitas Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Program Pengembangan Kecamatan. 2002. *Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan Belajar Dari Pengalaman*. Jakarta: PT. Duta Esa Astuti.
- Lestari, Delfiazi Puji. 2010. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagai Kebijakan Pro Gender di Kecamatan Teluk Gelam Ogan Komering Ilir*. Palembang: Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sumatera Selatan. 2011. Palembang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Betung. 2011. Pemerintah Kabupaten Banyuasin: Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Ridjal, Fauzie, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husein. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rogers, Barbara. 1980. *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies*. London: Tavistock.
- Sari, Meilia. 2013. Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz.
- Sen, Amartya. 1999. *Development As Freedom*. New York: Anchor Book.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stoller, Robert. 1968. *Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity*. London: Hogarth Press.
- Subhan, Zaitunah. 2002. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Membangun *Good Governance*. Jakarta: El-Kahfi (Lembaga Kajian Humanis dan Feminis Islam).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Synder, Margaret. 1995. *Transforming Development: Women, Poverty and Politics*. London: IT Press.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tong, R. 1989. *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*. Boulder. CO: Westview Press.
- Unger, Rhoda K. 1979. *Female and Male Psychological Perspectives*. New York, Philadelphia, San Francisco & London.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Vico, G, 1744/1948. *The New Science of Giambattista Vico*. Ithaca. New York: Cornell University Press.
- Vitalaya, Aida. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Kampus IPB Taman Kencana Bogor: IPB Press.

Wasistiono, Sadu. 1999. *Keberdayaan dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Windy N, Hastanti. 2004. *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki)*. Yogyakarta: CV. Hanggara Kreator.

Williams, Suzanne, Janet Seed, dan Adelina Mwau. 1994. *The OXFAM Gender Training Manual*, Oxford: Oxfam.

Wilson, Woodrow 1887. "*The Study of Administration*". *Political Science Quarterly*. Juni 1887.

Wollstonecraft, M. 1779/1977, dalam J. M. Todd (ed.), *A Wollstonecraft Anthology*. Bloomington: Indiana University Press.